

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN TERHADAP
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**ROSITA NIRMALASARI
NIM. 23205253 2 0019**



**PROGRAM STUDI MAGISTER
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARBARU
2025**

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN TERHADAP
PENGENDALIAN PENGUNAAN KAWASAN HUTAN
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**ROSITA NIRMALASARI
NIM. 23205253 2 0019**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
MAGISTER LINGKUNGAN
pada Program Studi Magister (S2) PSDAL PPs ULM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARBARU
2025**


Judul Tesis : Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan Terhadap Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan
Nama : Rosita Nirmalasari
NIM : 23205253 2 0019

disetujui,


Komisi Pembimbing



Dr. Badaruddin, S. Hut., M.P.
Ketua



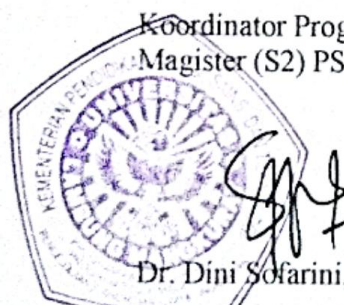
Prof. Dr. Ir. Achmad Syamsu Hidayat, M.P.
Anggota I



Dr. Hafziannor, S.Hut, M.P.
Anggota II

diketahui,

Koordinator Program Studi
Magister (S2) PSDAL



Dr. Dini Sofarini, S. Pi., M.S.

Tanggal Lulus:

Direktur Pascasarjana
Universitas Lambung Mangkurat



Darang Biyatmoko, M.Si.

Tanggal Wisuda:



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 089/UN8.4/DP/2025

Sertifikat ini diberikan kepada:

Rosita Nirmalasari

Dengan Judul Tesis :

Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan terhadap Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan
Di Provinsi Kalimantan Selatan

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 02 Juli 2025

Direktur,


Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.

NIP 196805071993031020



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosita Nirmalasari
NIM : 23205253 2 0019
Program Studi : S2 - Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Fakultas : Program Pascasarjana
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Tesis : **"Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan terhadap Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan"**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarbaru, Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Rosita Nirmalasari
NIM 23205253 2 0019

RINGKASAN

Rosita Nirmalasari. 2025. Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan terhadap Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan. Pembimbing: Dr. Badaruddin, S. Hut., M.P; Prof. Dr. Ir. Achmad Syamsu Hidayat, M.P.; Dr. Hafiziannor, S.Hut, M.P.

Banjarbaru. Pengenaan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) bagi pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan penggunaan kawasan hutan dan mendapatkan dana pengganti bagi pemulihan kawasan hutan (kompensasi) atas nilai manfaat yang hilang akibat kegiatan penggunaan di luar kegiatan kehutanan dalam rangka menjaga keseimbangan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Oleh karena itu efektivitas dari pengenaan kewajiban tersebut perlu analisis sejauh mana upaya tersebut mampu mengendalikan penggunaan kawasan hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kewajiban pembayaran PNBP PKH dalam mengendalikan penggunaan kawasan hutan dengan menganalisis tiga parameter yang mempengaruhinya yaitu tingkat pemahaman dan motivasi wajib bayar dalam membayar PNBP PKH, tingkat kepatuhan dan tingkat pengendalian luas penggunaan kawasan hutan dengan adanya pengenaan kewajiban ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah pemegang PPKH. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumen kemudian divalidasi melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Pendekatan evaluasi menggunakan model Context, Input, Proocess dan Product (CIPP). Penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan pengenaan kewajiban pembayaran PNBP PKH bagi pemegang PPKH kurang efektif dalam mengendalikan penggunaan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan tingkat efektivitas 68,16%. Kurangnya efektivitas ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan motivasi wajib bayar, tingkat kepatuhan wajib bayar dan tingkat pengendalian luas penggunaan kawasan hutan yang kurang efektif. Oleh karena itu, upaya pengendalian masih perlu ditingkatkan seperti evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan mengenai PNBP PKH secara terus menerus mengikuti perkembangan dinamika kegiatan penggunaan kawasan hutan, pemberian dan penegakan sanksi yang lebih ketat baik administratif maupun pidana disertai juga kemudahan dalam birokrasi, apresiasi kepada wajib bayar yang patuh dalam memenuhi kewajiban serta sosialisasi dan bimbingan teknis yang lebih intensif kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas kewajiban dalam kegiatan penggunaan kawasan hutan.

SUMMARY

Rosita Nirmalasari. 2025. Analysis of the Effectiveness of Non-Tax State Revenue Payment Obligations for Forest Area Use in Controlling Forest Area Use in South Kalimantan Province. Supervisors: Dr. Badaruddin, S. Hut., M.P; Prof. Dr. Ir. Achmad Syamsu Hidayat, M.P.; Dr. Hafiziannor, S.Hut, M.P.

Banjarbaru. The imposition of payment obligations for Non-Tax State Revenue (PNBP) for Forest Area Use (PKH) on holders of Forest Area Use Permits (PPKH) is an effort by the Government to control forest area use and obtain compensation funds for forest area recovery. The extent to which these efforts can control forest area use warrants an analysis of their effectiveness.

This research aims to analyze the effectiveness of the mandatory payment of PNBP PKH in controlling the use of forest areas by analyzing three influencing parameters, namely the level of understanding and motivation of obligors in paying PNBP PKH, the level of compliance, and the level of control over the use of forest areas with the imposition of this obligation.

This research employs a qualitative descriptive approach in an evaluative study. The research subjects were PPKH holders. Data collection was conducted using interview techniques and document studies, and then validated through source triangulation and data collection technique triangulation. The evaluation approach uses the Context, Input, Process, and Product (CIPP) model. The study was conducted in South Kalimantan Province.

The research results indicated that the imposition of PNBP PKH payment obligations on PPKH holders was less effective in controlling forest area usage in South Kalimantan Province, with an effectiveness level of 68.16%. This lack of effectiveness was influenced by the level of understanding and motivation among payers, the level of compliance among payers, and the level of control over the extent of forest area use, which was less effective. Therefore, control efforts still need to be improved, such as the continuous evaluation and revision of legislation regarding Non-Tax State Revenues (PNBP) for the Family Hope Program (PKH) in line with the dynamic developments in the use of forest areas, the provision and enforcement of stricter sanctions both administratively and criminally, along with facilitating bureaucracy, appreciation for compliant taxpayers in fulfilling their obligations, and more intensive socialization and technical guidance for business actors to enhance understanding and awareness of their obligations in the use of forest areas.

Banjarmasin, June 30, 2025

Approved by:

Head of Language Center



Dr. Hj. Noor Eka Chandra, M.Pd

NIP. 197710232001122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
UPA BAHASA ULM

Jalan Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 70123 Banjarmasin
Telepon/Fax.: (0511) 3308140
Email: uptbahasa@ulm.ac.id

SURAT KETERANGAN

NO: 100/UN8.16/BS/2025

Bersama ini kami menerangkan bahwa Abstrak bahasa Inggris dari judul Thesis:
***“Analysis of the Effectiveness of Non-Tax State Revenue Payment Obligations
for Forest Area Use in Controlling Forest Area Use in South Kalimantan
Province”*** yang disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Rosita Nirmalasari
Nim : 2320525320019
Jurusan/Fakultas : S2 PSDAL
Program : Pascasarjana

telah diverifikasi bahasa Inggris yang digunakan sesuai dengan makna dari abstrak
asli yang ditulis oleh mahasiswa tersebut di atas. (Abstrak terlampir) Demikian Surat
Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, June 30, 2025
Kepala.



Dr. Hj. Noor Eka Chandra, M.Pd
NIP. 197710232001122003

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis lahir di Samarinda pada tanggal 17 Maret 1982, anak kedua dari empat bersaudara pasangan Jacob Ismail dan Siti Hamdah. Penulis menempuh pendidikan dasar pada SD Muhammadiyah I Samarinda dan lulus pada tahun 1994. Setelah itu melanjutkan di SMP Negeri 1 Samarinda dan tamat pada tahun 1997. Ditahun yang sama penulis disekolahkan di Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) Samarinda yang pada saat itu merupakan sekolah ikatan dinas di bawah Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan lulus pada tahun 2000.

Setelah kurang lebih delapan bulan lulus dari SKMA, penulis diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan (BIPHUT) Wilayah IV di Samarinda. BIPHUT yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kehutanan di daerah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur dan sempat menjadi Balai Pemantapan Kawasan Hutanan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) pada saat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup bergabung.

Penulis resmi menjadi PNS pada bulan Maret tahun 2001. Sembari mengabdikan pada negara tepatnya ditahun yang sama, dalam rangka meningkatkan kapasitas diri penulis melanjutkan pendidikan sarjana (S1) di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2005. Pada tahun 2018 penulis mengajukan alih tugas ke BPKHTL Wilayah V Banjarbaru yang sekarang kembali menjadi BPKH karena alasan mengikuti suami dan diterima pada tahun 2019. Pada tahun 2023 penulis mengajukan izin belajar kembali pada Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Universitas Lambung Mangkurat dan lulus pada tahun 2025.

ROSITA NIRMALASARI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan terhadap Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan”**. Tesis ini merupakan salah satu kewajiban dan tahapan dalam penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PS S2 PSDAL) Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.

Pada kesempatan ini penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada **Dr. Badaruddin, S. Hut., M.P** selaku ketua Komisi Pembimbing serta kepada **Prof. Dr. Ir. Achmad Syamsu Hidayat, M.P.** dan **Dr. Hafziannor, S.Hut, M.P.** selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan perhatian, arahan, dan bimbingan dalam penulisan tesis. Juga kepada keluarga, sahabat, pimpinan dan rekan-rekan yang telah mendukung serta mendoakan dengan tulus hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Tersusunnya Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan atau bahan pertimbangan dalam perbaikan konsep dan implementasi dari kebijakan PNBP PKH agar lebih efektif dalam mengendalikan penggunaan kawasan hutan sehingga pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan lebih optimal secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Penulis menyadari tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan Tesis ini. Kritik dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan tangan terbuka. Akhir kata, semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah kekayaan referensi dalam dunia penelitian.

Banjarbaru, Juli 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SALINAN SERTIFIKAT UJI PLAGIASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
SURAT KETERANGAN VALIDASI RINGKASAN	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR PERSAMAAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Asumsi dan Lingkup Masalah	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan	8
2.2. Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH)	13
2.2.1. Pengelolaan PNBP PKH	15
2.2.1.1. Dasar Hukum Pengenaan PNBP PKH	15
2.2.1.2. Nomenklatur yang Digunakan dalam Pengelolaan PNBP PKH	17
2.2.1.3. Penyusunan <i>Baseline</i> Penggunaan Kawasan Hutan	18
2.2.1.4. Jenis dan Tarif PNBP PKH	19
2.2.1.5. Penilaian Kepatuhan Pembayaran PNBP PKH ..	22

2.2.2. Kewajiban Reklamasi Hutan	23
2.2.3. Kewajiban Perlindungan Hutan atas Areal PPKH	25
2.3. Teori Efektivitas dan Kepatuhan	25
2.3.1. Teori Efektivitas	25
2.3.2. Pendekatan Penilaian Efektivitas	27
2.3.3. Teori Kepatuhan	28
2.4. Pengaruh Biaya Non-Operasional Bagi Perusahaan	29
III. METODE PENELITIAN	31
3.1. Waktu, Tempat dan Objek Penelitian	31
3.2. Peralatan dan Bahan Penelitian	31
3.3. Prosedur Pengumpulan Data	32
3.3.1. Perumusan Parameter dan Indikator Efektivitas	33
3.3.2. Jenis dan sumber data	36
3.3.3. Teknik Pengumpulan Data	37
3.3.3.1. Teknik Sampling	37
3.3.3.2. Triangulasi Sumber Data	41
3.3.4. Langkah Pengumpulan Data	42
3.4. Pengolahan dan Analisis Data	44
3.5. Kerangka Pikir Penelitian	55
IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	56
4.1. Lokasi Penelitian	56
4.2. Keadaan Geografis	56
4.3. Keadaan Iklim	57
4.4. Keadaan Demografis	57
4.5. Keadaan Ekonomi	58
4.6. Keadaan Kawasan Hutan	59
4.7. Berbagai Kegiatan yang Menggunakan Kawasan Hutan	60
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	62
5.1. Tingkat Pemahaman dan Motivasi Wajib Bayar dalam Membayar PNBPKH	62
5.2. Tingkat Kepatuhan Wajib Bayar dalam Membayar PNBPKH	72
5.3. Tingkat Pengendalian Luas Penggunaan Kawasan Hutan	79
5.4. Analisis Efektivitas Kewajiban Pembayaran PNBPKH Dalam Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan	85

VI. KESIMPULAN DAN SARAN	91
6.1. Kesimpulan	91
6.2. Rekomendasi	92
6.3. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Jenis dan Tarif PNBPKH untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2014	19
2.2. Jenis dan Tarif PNBPKH untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2024	20
3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian	31
3.2. Hasil Perhitungan Jumlah Sampel	40
3.3. Nilai Bobot/Skor Indikator Efektivitas	44
3.4. Kategori Efektivitas	48
3.5. Kategori Efektivitas Tingkat Pemahaman dan Motivasi Wajib Bayar	50
3.6. Kategori Efektivitas Tingkat Kepatuhan Wajib Bayar	53
3.7. Kategori Efektivitas Tingkat Pengendalian Luas Kawasan Hutan	54
5.1. Hasil Penilaian Efektivitas Tingkat Pemahaman dan Motivasi Wajib Bayar dalam Membayar PNBPKH	62
5.2. Hasil Penilaian Efektivitas Tingkat Kepatuhan Wajib Bayar dalam Membayar PNBPKH	72
5.3. Hasil Penilaian Efektivitas Tingkat Pengendalian Luas Penggunaan Kawasan Hutan	79
5.4. Hasil Penilaian Efektivitas Kewajiban Pembayaran PNBPKH dalam Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1. Bagan Alur Prosedur Penelitian	33
3.2. Komponen Analisis Data Model Interaktif	49
3.3. Bagan Alur Kerangka Pikir Penelitian	55
2.1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (miliar rupiah), 2024	59

DAFTAR PERSAMAAN

Persamaan	Halaman
2.1. Perhitungan PNBP PKH Kategori L1 dan L2 Berdasarkan PP.33 Tahun 2014.....	19
2.2. Perhitungan PNBP PKH Kategori L1, L2 dan L3 Berdasarkan PP.33 Tahun 2014	19
3.1. Rumus Slovin untuk Penentuan Jumlah Sampel	39
3.2. Rumus Sudjana untuk Penentuan Jumlah Sampel Berdasarkan Unit Sampling	39
3.3. Perhitungan Nilai Indeks Efektivitas Metode Skoring Skala Likert	47
3.4. Perhitungan Nilai Efektivitas Tingkat Pemahaman dan Motivasi Wajib Bayar Dalam Membayar PNBP PKH	50
3.5. Perhitungan Nilai Efektivitas Tingkat Kepatuhan Wajib Bayar Dalam Membayar PNBP PKH	51
3.6. Perhitungan Nilai Efektivitas Tingkat Pengendalian Luas Kawasan Hutan	53
3.7. Perhitungan Nilai Efektivitas Kewajiban Pembayaran PNBP PKH Dalam Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	Peta Sebaran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	97
2.	Kuesioner Penelitian	
	2.1. Formulir Identitas IPPKH/PPKH	98
	2.2. Formulir Data Responden Perwakilan Pemegang IPPKH/PPKH (Wajib Bayar)	99
	2.3. Formulir Lembar Penilaian Efektivitas Kewajiban Pembayaran PNBPKH dalam Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	100
3.	Daftar Sebaran dan Jumlah Sampel	106
4.	Sistematika Metode Penelitian dalam Mencapai Tujuan Penelitian	110
5.	Formulir PNBPKH-1	112
6.	Formulir PNBPKH-3	113
7.	Rekapitulasi Data Hasil Penilaian Efektivitas	114
8.	Luas Areal Penyangga/Pengembangan dan Areal Reklamasi pada Sampel PPKH sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024	117
9.	Rekomendasi Peningkatan Efektivitas Kewajiban Pembayaran PNBPKH di Provinsi Kalimantan Selatan	121
10.	Dokumentasi Kegiatan	125
11.	Daftar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) / Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Desember 2024	128
12.	Peta Indikasi Areal Terganggu Pertambangan di Dalam Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Tahun 2024	137